

BAB V

PENUTUP

Dari serangkaian tulisan dalam skripsi ini, terlihat bahwa sektor pertanian begitu luas dan kompleks. Luas dalam berbagai jenis komoditas dan kegiatan yang menjadi cakupannya, serta kompleks karena berbagai persoalan yang dihadapinya belum terselesaikan hingga saat ini.

Sektor pertanian sangat membutuhkan dukungan dan keberpihakan dari pemerintah untuk menggulirkan aktivitas ekonominya. Tanpa dukungan dan keberpihakan ini, sektor pertanian tidak mungkin dapat tumbuh dan berkembang. Namun, sejak pertengahan tahun 1980an, sektor pertanian Indonesia mengalami peminggiran oleh politik karena terjadi perubahan strategi pembangunan saat itu. Perubahan strategi pembangunan dari berbasis sektor pertanian ke sektor industri, telah menyudutkan sektor pertanian dalam pembangunan.

Akibat dari peminggiran oleh politik ini, sektor pertanian Indonesia memiliki banyak permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Masalah pertama yang ditimbulkan dari peminggiran sektor pertanian oleh politik ini adalah masalah sempitnya lahan pertanian. Rata-rata penguasaan lahan pertanian per orang hanya sekitar 0,2 hektar untuk sektor tanaman pangan, khususnya untuk petani padi. Merebaknya pembangunan fisik khususnya di Pulau Jawa dan Bali juga memiliki andil besar dalam meminggirkan kedudukan dan eksistensi petani, baik pembangunan infrastruktur, industri, perumahan, dan lain-lainnya. Semua pembangunan tersebut

membutuhkan tanah, dan sebagian besar tanah yang digunakan adalah tanah pertanian. Yang lebih menyedihkan, tanah yang dialihkan fungsinya tersebut umumnya berlokasi strategis, subur dan sangat produktif. Sempitnya penguasaan lahan pertanian, dan diperparah dengan kecenderungan konversi lahan pertanian khususnya di Jawa, telah mengakibatkan produksi tanaman pangan khususnya padi menurun.

Dengan sempitnya lahan pertanian yang dimiliki petani, maka kesejahteraan petani menjadi sangat rendah. Produktivitas lahan pertanian yang sempit tidak akan mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga petani. Akibatnya, petani di Indonesia identik dengan kemiskinan.

Permasalahan ketiga adalah masalah permodalan. Sudah lama disadari, petani Indonesia pada umumnya belum memiliki modal yang mencukupi. Hal ini berkaitan dengan sempitnya kepemilikan lahan oleh petani, khususnya petani padi. Karena produktivitas yang rendah dari lahan yang sempit, maka petani khususnya petani padi tidak memiliki kecukupan modal untuk memproduksi. Apalagi jika harga hasil pertanian anjlok ketika panen. Hal ini akan semakin membuat kerugian yang diderita petani semakin besar.

Pada Pemerintah Orde Baru masalah ini di pecahkan dengan penyediaan kredit Bank Indonesia, yang disalurkan melalui sistem perbankan, khususnya bank rakyat, yaitu fasilitas Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Tetapi sekarang ini, KLBI telah dihapus dan Pemerintah saat ini cenderung untuk menanggung semua jenis

subsidi. Tanpa adanya modal yang memadai, petani tidak mungkin memproduksi secara maksimal.

Masalah keempat adalah teknologi. Seperti yang kita ketahui, bahwa sebagian besar petani kita belum banyak menggunakan hasil-hasil teknologi. Hal ini terkait dengan masalah permodalan yang dihadapi petani. Modal yang tidak mencukupi, memaksa petani untuk tidak menggunakan hasil teknologi pertanian seperti penggunaan bibit unggul, pupuk, dan sebagainya. Akibatnya, produktivitas pertanian menjadi sangat berkurang.

Selain permasalahan diatas, sektor pertanian Indonesia juga memiliki masalah berupa sumber daya manusia (SDM) dibidang pertanian yang masih rendah. Dari 45 juta lebih orang yang bekerja disektor pertanian, 80 persennya adalah berpendidikan sekolah dasar. Dengan SDM yang rendah, maka akan sulit membangun sektor pertanian secara maksimal.

Disisi lain, dengan segala keterbatasannya, sektor pertanian Indonesia pada tahun 2007 harus menghadapi sektor pertanian negara ASEAN lainnya dalam integrasi sektor pertanian ASEAN. Liberalisasi sektor pertanian ini akan semakin membuat sektor pertanian Indonesia hancur karena tidak mampu bersaing.

Negara-negara ASEAN yang berpotensi menjadi ancaman bagi sektor pertanian Indonesia adalah Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Dari ketiga negara ini, sektor pertanian Indonesia mendapat ancaman serius. Dari Malaysia, sektor perkebunan Malaysia menjadi ancaman bagi sektor perkebunan Indonesia. Dampak negatif ini dari liberalisasi ini tidak akan dirasakan langsung oleh sektor perkebunan

maupun petani perkebunan Indonesia. Namun dampak negatif ini akan terlihat pada perbedaan kesejahteraan petani perkebunan di kedua negara, dimana petani Malaysia akan memiliki kesejahteraan ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan petani Indonesia dengan adanya liberalisasi sektor pertanian ASEAN.

Sedangkan dengan Thailand, sektor pertanian Indonesia yang berpotensi terancam adalah sektor tanaman pangan. Pada tahun 2003 volume impor beras Indonesia mencapai 2 juta ton. Dari total impor ini, Thailand baru memasok sekitar 30 persen, sisanya berasal dari India, Vietnam, dan Australia. Sebelum dilaksanakannya liberalisasi sektor pertanian, pemerintah masih bisa membatasi jumlah impor. Namun jika liberalisasi ini dilaksanakan pembatasan jumlah impor tidak bisa dilakukan lagi, dan beras Thailand akan semakin membanjir di pasar domestik.

Jika impor 2 juta ton beras sudah membuat harga beras turun dan menekan harga gabah kering giling petani (GKG), apalagi jika beras yang masuk lebih dari itu. Hal ini akan semakin membuat 25 juta petani padi Indonesia semakin terpuruk kesejahteraannya. Dampak lebih jauh lagi adalah meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Hal ini baru produk pertanian Thailand yang berupa beras belum produk pertanian yang lain seperti buah-buahan dengan label "Bangkok" yang telah memenuhi supermarket di Indonesia.

Tidak berbeda jauh dengan Thailand, Vietnam juga merupakan negara yang menjadi ancaman bagi sektor pertanian Indonesia dalam menghadapi liberalisasi Sektor pertanian ASEAN khususnya pada sektor tanaman pangan. Produk utama dari

ekspor produk pertanian Vietnam adalah beras. Dengan liberalisasi ini, tidak menutup kemungkinan bahwa Vietnam akan memasarkan produk pertaniannya (terutama beras) di pasar dalam negeri Indonesia.

Banyaknya kelemahan dari sektor pertanian Indonesia dalam menghadapi liberalisasi sektor pertanian ASEAN, serta potensi ancaman dari beberapa negara ASEAN membuat peluang sektor pertanian Indonesia dalam pasar bebas ASEAN menjadi kecil. Dengan demikian, hipotesa bahwa peluang sektor pertanian Indonesia untuk bersaing dalam pasar bebas ASEAN adalah kecil bisa dikatakan benar.

Agar sektor pertanian mampu menjadi sektor yang dapat bersaing dalam AFTA, dukungan dari pemerintah mutlak diperlukan. Agar dukungan ini bisa maksimal dilakukan, pemerintah harus melakukan perubahan cara pandangya terhadap sektor pertanian. Sikap peminggiran terhadap sektor pertanian oleh pemerintah harus dirubah, dan digantikan dengan sikap keberpihakan terhadap sektor ini. Sikap keberpihakan ini, harus diikuti dengan langkah nyata untuk memajukan sektor pertanian.

Dalam jangka pendek, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung sektor pertanian agar mampu bersaing dalam AFTA. Pertama adalah menjaga stabilitas harga pangan terutama beras di pasaran. Hal ini dapat dilakukan dengan pembelian gabah atau beras oleh pemerintah melalui BULOG. Dengan pembelian ini, harga ditingkat petani bisa dijaga, dan tidak mengalami kemerosotan harga yang mengakibatkan petani rugi. Dengan harga yang stabil dan memberikan keuntungan bagi petani, maka sirkulasi produksi akan terus berjalan,

dan ketersediaan pangan di pasar dapat dijaga, yang pada akhirnya kebijakan impor bisa ditinggalkan.

Kedua adalah, mengeluarkan kebijakan yang mendukung sektor pertanian untuk berkembang. Dalam jangka pendek, kebijakan tersebut bisa berupa pemberian subsidi bagi petani, pemberian modal melalui lembaga keuangan dengan suku bunga rendah, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian. Saat ini pemerintah hanya mengalokasikan dana sebesar 5 triliun rupiah bagi sektor pertanian. Sebesar 1.3 triliun digunakan sebagai subsidi pupuk, dan sisanya digunakan demi kepentingan lain seperti pembangunan irigasi, riset, dan sebagainya. Dana sebesar ini tidak memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan sektor pertanian.

Sedangkan dalam jangka panjang, pemerintah harus memprioritaskan sektor pertanian sebagai motor pembangunan nasional. Prioritas ini juga harus diikuti dengan pembuatan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan untuk memacu pertumbuhan sektor pertanian. Kebijakan pemerintah dalam jangka panjang ini bisa berupa peningkatan alokasi anggaran bagi sektor pertanian, meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengembangan iptek bagi pertumbuhan sektor pertanian, dukungan pencarian akses pasar, dan sebagainya.

Apabila sektor pertanian telah dapat tumbuh secara berkesinambungan, maka akan muncul industri hulu maupu hilir yang berbasis pada pertanian. Industri hilir adalah industri yang menunjang berlangsungnya kegiatan di sektor pertanian. Industri

dan sebagainya. Sedangkan industri hilir adalah industri yang mengolah bahan mentah pertanian menjadi bahan jadi yang memiliki nilai tambah lebih secara ekonomi. Contoh dari industri hilir ini adalah industri pengolahan bahan makanan. Dari industri hilir sektor pertanian ini, akan muncul industri yang menopang industri hilir tersebut. Contoh industri penopang ini adalah industri pembuatan kaleng, industri kertas, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor primer dan penting dalam perjalanan pembangunan perekonomian suatu negara. Dari sektor pertanian ini akan muncul berbagai macam industri, baik hulu maupun hilir yang akan memberikan kontribusi dalam pembangunan.

Untuk mencapai pada tahapan diatas, selain kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan, keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi dalam upaya pembangunan sektor pertanian.